



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/77/HM.01/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA
DALAM MENGHADAPI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* memberikan pengaruh pada kegiatan usaha kecil dan menengah;
- b. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
13. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3/M/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19;
14. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 Tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Bagi Usaha Kecil dan Menengah;

KEDUA : Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 6 (enam) tahapan, yaitu tahap:

1. Mengidentifikasi Produk atau Layanan Utama;
2. Menetapkan Tujuan Rencana Keberlangsungan Usaha bagi UKM;
3. Melakukan Evaluasi Potensi Dampak Gangguan Terhadap Usaha dan Pekerja;
4. Menyusun Daftar Tindakan Untuk Melindungi Usaha;
5. Membuat Daftar Kontak; dan
6. Meninjau, Mempertahankan, dan Memperbarui Rencana Keberlangsungan Usaha.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 Juli 2020

Plt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja



[Signature]
Drs. M. Iswandi Hari, SH., M.Si
NRP 63020780

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/77/HM.01/VII/2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM MENGHADAPI
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA
DALAM MENGHADAPI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Seiring meningkatnya jumlah kasus konfirmasi positif dan/atau jumlah kematian akibat Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Untuk mempercepat penanganan Covid-19, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Bencana nasional akibat Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan namun juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19, memberikan pengaruh terhadap aktivitas perekonomian di masyarakat antara lain penurunan jual-beli, penurunan persediaan logistik dan jasa, perubahan tingkat permintaan barang dan jasa,

merumahkan pekerja/buruh hingga penutupan perusahaan yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak hanya industri besar, pandemi COVID-19 juga sangat mempengaruhi kegiatan usaha kecil dan menengah. Selain kegiatan UKM di sektor produksi, kegiatan UKM yang bergerak di bidang jasa pun dilaporkan mengalami penurunan omset yang sangat signifikan.

Untuk mempertahankan kegiatan usaha selama pandemi Covid-19, pelaku UKM harus menyusun perencanaan keberlangsungan usaha. Perencanaan keberlangsungan usaha ini dimaksudkan untuk mempertahankan semua sumber utama usaha yang ada dalam rangka mendukung kegiatan esensial usaha.

II. TUJUAN

1. Tujuan umum:

Melindungi keberlangsungan usaha kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19.

2. Tujuan khusus:

- a. Mengurangi penyebaran Covid-19 pada kegiatan usaha kecil dan menengah dalam rangka menurunkan jumlah kesakitan serta kematian;
- b. Membantu pelaku UKM agar dapat mengantisipasi kondisi darurat kesehatan dan kegiatan usahanya tetap berjalan baik selama pandemi Covid-19;
- c. Membantu pelaku UKM dalam menyusun Rencana Keberlangsungan Usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19;
- d. Mengurangi dampak negatif ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pedoman ini ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, meliputi tahapan-tahapan penyusunan perencanaan keberlangsungan usahanya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA
DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19
BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha ini dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19, dengan mempertahankan empat komponen utama untuk mendukung kegiatan esensial agar kegiatan usahanya tetap berjalan dengan baik selama masa pandemi dan juga mencegah penyebaran Covid-19 melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Menilai tingkat risiko dan kerentanan usaha:

Penilaian risiko bertujuan untuk menciptakan profil risiko pada usaha kecil dan menengah dan tingkat kerentanan usaha terhadap Covid-19. Penilaian risiko dapat dilakukan dengan cepat dalam menentukan tingkat risiko/kerentanan bagi usaha.

Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan dalam tabel-tabel di bawah ini. Ada empat bagian yang terdiri dari total 60 pertanyaan berkaitan dengan orang, proses, keuntungan dan kemitraan. Tingkat kerentanan usaha didapatkan dengan menjumlahkan berapa kali jawaban "ya" di setiap pertanyaan.

Tabel 1. Kuesioner penilaian risiko dan tingkat kerentanan usaha

Jawab Ya jika Anda tidak yakin atau tidak tahu.

I Matriks Risiko: Orang		
Lingkungan Kerja Aman		
1	Saat ini ada risiko keselamatan diri seperti tingginya kasus COVID-19 di daerah tempat usaha Anda.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Secara fisik tidak aman bagi pekerja untuk datang dan pergi dari tempat kerja (mis. menggunakan transportasi umum bersama dll).	☐ Ya ☐ Tidak
3	Terdapat peningkatan jumlah izin sakit	☐ Ya ☐ Tidak
4	Karena sifat usaha saya, tidak mungkin untuk mengubah cara kerja sehingga pekerja dapat bekerja dari rumah (Telework).	☐ Ya ☐ Tidak
5	Anda mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas sanitasi yang memadai (fasilitas mencuci, sanitizers, gel tangan, sarung tangan, masker dll).	☐ Ya ☐ Tidak
6	kendaraan yang digunakan untuk kepentingan usaha Anda (mis. pengiriman, transportasi staf) belum dilengkapi dengan alat pembersih dan dilakukan pembersihan rutin.	☐ Ya ☐ Tidak

7	Pekerja memiliki tanggung jawab tambahan terhadap perawatan/keluarga karena adanya penutupan sekolah atau anggota keluarga yang sakit.	☐ Ya ☐ Tidak
8	Ada kasus penularan COVID-19 pada staf atau anggota keluarga terdekat mereka.	☐ Ya ☐ Tidak
9	Pekerja kurang termotivasi karena lingkungan kerja yang penuh tekanan akibat dari usaha-usaha pencegahan COVID-19.	☐ Ya ☐ Tidak
10	Pekerja meninggalkan pekerjaan mereka karena potensi gangguan keselamatan dan/atau insiden.	☐ Ya ☐ Tidak
11	Perilaku diskriminatif/stigmatisasi di antara pekerja yang menyebabkan ancaman dan intimidasi pada sesama pekerja.	☐ Ya ☐ Tidak
12	Dalam usaha, ada kontak fisik dekat dengan pelanggan/pemasok	☐ Ya ☐ Tidak
13	Pekerja mengalami trauma pribadi seperti kematian atau sakit karena Covid 19 pada anggota keluarganya	☐ Ya ☐ Tidak
14	Posisi berdekatan di tempat kerja diperlukan dalam produksi/pengiriman	☐ Ya ☐ Tidak
15	Tidak ada staf yang diberi tanggung jawab untuk melakukan review harian himbauan resmi terhadap risiko dan rekomendasi terkait Covid-19	☐ Ya ☐ Tidak
16	Tidak ada atau sedikit prosedur untuk inspeksi pribadi dalam identifikasi bahaya yang mengakibatkan penularan COVID-19 (misalnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan rutin).	☐ Ya ☐ Tidak
17	Tidak ada atau sedikit kegiatan audit rutin yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya yang ada atau akan muncul (misalnya area yang sering disentuh)	☐ Ya ☐ Tidak
18	Pekerja saat ini tidak diberikan pelatihan langsung (atau akses ke pelatihan) dalam kewaspadaan terhadap Covid-19 dan tindakan dasar perlindungan diri sendiri dan orang lain	☐ Ya ☐ Tidak
19	Usaha saya tidak melapor kepada otoritas kesehatan masyarakat. Pekerja yang sakit atau dicurigai sakit covid-19 dikonfirmasi di lokasi usaha.	☐ Ya ☐ Tidak

TOTAL _____/19

II Matriks Risiko: Proses		
Bangunan dan Mesin		
20	Anda menghadapi kesulitan mengakses peralatan dan mesin yang diperlukan untuk menjalankan usaha Anda dari pemasok	☐ Ya ☐ Tidak
21	Telah terjadi gangguan atau keterlambatan yang signifikan pada layanan dukungan yang diperlukan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin utama usaha anda.	☐ Ya ☐ Tidak
22	Usaha anda (misalnya pekerja, peralatan dan bahan baku) tidak atau hanya sebagian yang di asuransikan	☐ Ya ☐ Tidak
Stok dan bahan baku		
23	Sejumlah besar bahan baku anda di dapat dari import	☐ Ya ☐ Tidak

24	Anda mengalami keterlambatan dalam mengamankan bahan baku/ input produksi penting dari pelabuhan	☐ Ya ☐ Tidak
25	Anda mengalami kesulitan mengamankan stok dan bahan baku kunci	☐ Ya ☐ Tidak
26	Usaha anda telah terdampak secara negatif dari meningkatnya pembatasan/ tuntutan oleh pemerintah (misalnya peningkatan pemeriksaan kesehatan menyebabkan tertundanya pengiriman produk yang datang/pergi dari tempat usaha Anda)	☐ Ya ☐ Tidak
27	Stok dan/atau bahan baku utama anda hanya terdapat di satu lokasi	☐ Ya ☐ Tidak

TOTAL _____/8

III Matriks Risiko: Keuntungan		
Pasar		
28	Klien anda terdampak secara negatif dari Covid-19 dan kemampuan mereka dalam membeli produk atau jasa anda	☐ Ya ☐ Tidak
29	Upaya resmi dari pemerintah terkait kesehatan masyarakat secara umum memberikan dampak secara negatif terhadap penjualan usaha anda	☐ Ya ☐ Tidak
30	Sejumlah persentase besar produk atau jasa anda melayani pasar non-domestik	☐ Ya ☐ Tidak
31	Pasar usaha anda terletak di negara dengan risiko sedang sampai tinggi	☐ Ya ☐ Tidak
32	Terdapat penurunan penjualan pada pasar usaha anda	☐ Ya ☐ Tidak
Pemasok		
33	Gangguan berdampak negatif pada pemasok utama Anda dan kemampuannya dalam memasok usaha Anda.	☐ Ya ☐ Tidak
34	Anda telah mengalami gangguan dalam persediaan Anda karena meningkatnya pembatasan oleh pemerintah.	☐ Ya ☐ Tidak
35	Anda hanya memiliki satu rute pasokan untuk mengakses pemasok utama Anda.	☐ Ya ☐ Tidak
36	Anda tidak memiliki pemasok alternatif yang dapat menyediakan barang dan jasa bila terjadi gangguan.	☐ Ya ☐ Tidak
37	Anda sangat bergantung pada pemasok asing untuk sebagian besar input utama dan bahan baku yang dibutuhkan untuk usaha Anda (lebih dari 75 persen input utama)	☐ Ya ☐ Tidak
Masyarakat		
38	telah terjadi kenaikan gangguan di masyarakat terkait intoleransi dan prasangka sebagaimana ditampilkan oleh media, demonstrasi di jalan dan perseteruan politik, dan lain sebagainya.	☐ Ya ☐ Tidak
39	Lingkungan media saat ini secara negatif telah mempengaruhi Lingkungan kerja.	☐ Ya ☐ Tidak
Lingkungan Ekonomi		
40	COVID-19 berdampak pada aktivitas ekonomi yang secara langsung berdampak pada usaha atau pasar tempat Anda beroperasi atau yang Anda harapkan.	☐ Ya ☐ Tidak
41	Tingkat pengangguran meningkat di pasar tempat Anda beroperasi.	☐ Ya ☐ Tidak

42	Telah terjadi peningkatan aktivitas kriminal atau peningkatan risiko kriminalitas yang mengarah pada usaha Anda sebagai akibat dari tekanan kegiatan ekonomi.	☐ Ya ☐ Tidak
43	Ada peningkatan mendadak dalam harga input dan barang lainnya diperlukan untuk melakukan operasi usaha Anda.	☐ Ya ☐ Tidak

TOTAL _____/16

IV Matriks Risiko: Kemitraan		
Utilitas publik (air, listrik, kesehatan, kebersihan)		
44	Ada gangguan yang signifikan atau terus-menerus dari utilitas publik utama (air, listrik, telekomunikasi, kesehatan dan sanitasi) yang berdampak negatif terhadap usaha atau pasar tempat Anda beroperasi.	☐ Ya ☐ Tidak
45	Ada gangguan yang signifikan atau terus-menerus dari utilitas publik utama (air, listrik, telekomunikasi, kesehatan dan sanitasi) yang berdampak negatif terhadap pekerja anda (misalnya fasilitas kebersihan di rumah)	☐ Ya ☐ Tidak
46	Ada perubahan negatif atau mendadak dari biaya yang terkait dengan utilitas.	☐ Ya ☐ Tidak
47	Telah ada peningkatan dalam praktek korupsi untuk akses ke utilitas publik atau prasarana umum (seperti perawatan kesehatan).	☐ Ya ☐ Tidak
Pihak ketiga (pelanggan, pesaing, dan penyedia jasa keuangan)		
48	Gangguan COVID-19 berdampak negatif bagi pesaing Anda dan kemampuan mereka untuk tetap kompetitif.	☐ Ya ☐ Tidak
49	Keterbatasan atau tidak ada ruang untuk berkolaborasi dengan pesaing untuk berbagi terkait praktik/ peralatan Kesehatan dan keselamatan.	☐ Ya ☐ Tidak
50	Keterbatasan atau tidak ada ruang untuk berkolaborasi dengan pesaing-untuk berbagi stok	☐ Ya ☐ Tidak
51	Keterbatasan atau tidak ada ruang untuk berkolaborasi dengan pesaing-untuk peralatan	☐ Ya ☐ Tidak
52	Kesulitan dalam mengakses keuangan atau perilaku layanan keuangan (misalnya, kewajiban peminjaman yang meningkat, lebih sedikit pilihan penyedia, dsb.) berdampak negatif terhadap operasi usaha Anda.	☐ Ya ☐ Tidak
Infrastruktur publik (telekomunikasi, jalan, pelabuhan)		
53	Penetapan pembatasan akses infrastruktur publik berdampak negatif terhadap usaha Anda atau pasar tempat Anda beroperasi atau Pekerja anda.	☐ Ya ☐ Tidak
54	Ada peningkatan biaya dalam menggunakan infrastruktur publik utama yang berdampak negatif terhadap usaha Anda atau pasar tempat Anda beroperasi	☐ Ya ☐ Tidak
Lingkungan politik dan regulasi		
55	Terdapat perubahan peraturan yang negatif atau mendadak (yaitu Peraturan perundangan) yang berdampak negatif terhadap usaha Anda atau pasar tempat Anda beroperasi	☐ Ya ☐ Tidak
56	Ada peningkatan ketidakpastian dalam lingkungan kebijakan/peraturan yang dapat berdampak negatif pada usaha Anda atau pasar tempat Anda beroperasi.	☐ Ya ☐ Tidak

57	Apakah terdapat perubahan peraturan yang bersifat negatif atau mendadak (yaitu Peraturan perundangan) yang berdampak negatif pada pekerja Anda?	☐ Ya ☐ Tidak
58	Pemerintah belum memberikan subsidi (mis. subsidi sewa atau upah) yang dapat membantu usaha dan pekerja saya selama wabah COVID-19.	☐ Ya ☐ Tidak
Kesehatan secara keseluruhan		
59	Tindakan seperti "keadaan darurat" atau pembatasan besar kebebasan bergerak telah atau akan ditetapkan?	☐ Ya ☐ Tidak
60	Usaha saya tidak memiliki rencana darurat untuk situasi krisis.	☐ Ya ☐ Tidak
TOTAL _____/16		

Dari kuesioner ini, identifikasi indikator mana (Orang, Proses, Keuntungan Dan Kemitraan) yang paling rentan pada usaha. Untuk menghitung total kerentanan, jumlahkan jawaban "ya" dalam empat penilaian kerentanan diri.

Skor risiko

Orang	Proses	Keuntungan	Kemitraan	Skor total
/ 19	/ 8	/ 16	/ 17	/ 60

Interpretasi Skor: Profil Risiko Usaha

Skor ini tidak menilai apakah usaha tersebut baik atau buruk. Ini hanyalah sebuah patokan pada risiko usaha dan kerentanan terhadap Covid-19, untuk membantu identifikasi aspek usaha ditingkatkan ketahanannya pada krisis Covid-19. Yang paling penting dapat mengetahui di mana faktor paling berisiko – pekerja, rantai pasokan, ketergantungan usaha pada pihak ketiga.

Di bawah ini adalah interpretasi Skor. Jika jawabab Ya:

- 40 – 60 : Usaha sangat rentan terhadap dampak negatif dari krisis Covid-19. Usaha sangat mungkin akan terdampak berat. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kerentanan bersifat internal atau eksternal dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko dan kerentanan terhadap Covid-19.
- 20 – 40 : usaha cukup rentan meskipun telah mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pahami Apakah kerentanan bersifat internal atau eksternal dan prioritaskan kerentanan tersebut saat menyusun rencana keberlanjutan usaha.
- 0 – 20 : Usaha memiliki profil risiko yang baik, tetapi masih ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan usaha. Pastikan untuk menyusun rencana

kelangsungan usaha untuk mengelola risiko ancaman internal dan eksternal.

B. Mengembangkan enam langkah rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 bagi usaha kecil dan menengah

1. Mengidentifikasi Produk atau Layanan Utama.

Menentukan produk atau layanan terpenting dengan mempertimbangkan kriteria berikut:

- a. Jenis produk/jasa yang menghasilkan pendapatan terbesar;
- b. Jenis produk/jasa yang dibutuhkan banyak pelanggan; dan
- c. Jenis produk/jasa yang tidak terkirim atau tidak terlayani akan mengakibatkan kerugian, penurunan produktivitas dan reputasi.

2. Menetapkan Tujuan Rencana Keberlangsungan Usaha bagi UKM.

Tujuan yang ingin dicapai pada usaha yang akan memberikan perlindungan kepada orang, proses, keuntungan dan kemitraan.

3. Melakukan Evaluasi Potensi Dampak Gangguan Terhadap Usaha dan Pekerja.

Melakukan penilaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang akan berlangsung, dan berapa lama kondisi tersebut akan mengganggu keberlangsungan usaha. Pelaku usaha harus mengetahui sumber daya apa saja yang diperlukan termasuk pemasok, mitra, dan kontraktor yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha utama.

4. Menyusun Daftar Tindakan Untuk Melindungi Usaha.

Pelaku usaha kecil dan menengah agar menyusun tindakan yang harus diprioritaskan untuk meminimalkan risiko terhadap:

- a. Pekerja/buruh (*People*): kehidupan pekerja dan anggota keluarga;
- b. Proses (*Process*): proses operasional perusahaan;
- c. Keuntungan (*Profit*): pendapatan perusahaan;
- d. Kemitraan (*Partnership*): menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan usaha.

5. Membuat Daftar Kontak.

Dengan adanya aturan dari pemerintah dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, maka aktivitas usaha akan lebih banyak terjadi secara non-fisik. Usaha dapat dilakukan melalui penjualan secara daring (*online*), pertemuan daring (*online meeting*) dan lainnya. Pelaku usaha

harus membuat sebuah daftar yang akurat dan terbaru yang berisi pemangku kepentingan utama yang memiliki pengaruh dalam keberlangsungan usaha.

6. Meninjau, Mempertahankan, dan Memperbarui Rencana Keberlangsungan Usaha.
 - a. Menguji rencana yang telah disusun untuk keperluan perbaikan rencana tersebut. Pengujian terhadap suatu rencana harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk selalu dapat mengidentifikasi masalah baru dan merumuskan pemecahannya;
 - b. Memperbarui tujuan rencana keberlangsungan usaha dan meningkatkan efektivitas;
 - c. Memperbarui evaluasi potensi dampak, strategi untuk keberlangsungan usaha dan prosedur lain yang terkandung dalam rencana keberlangsungan usaha; dan
 - d. Memastikan perbaikan terus-menerus dari semua proses yang termasuk dalam rencana keberlangsungan usahanya.

Contoh perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 bagi usaha kecil dan menengah

Ibu Sari pemilik usaha Katering yang biasa digunakan untuk acara resepsi pernikahan dan acara perhelatan lainnya di Jakarta. Ibu Sari memiliki total 25 pekerja

Ibu Sari melakukan penilaian risiko COVID-19 dan menyadari profil risikonya tinggi. Ia menghadapi beberapa pemasok bahan makanan untuk kebutuhan catering. Para pekerjanya bekerja dalam posisi berdekatan. Ibu Sari menyadari bahwa ia membutuhkan Perencanaan Keberlangsungan Usaha.

Langkah 1: Ibu Sari mengidentifikasi kegiatan utamanya

Kegiatan utama usaha Ibu Sari adalah menyediakan berbagai jenis makanan dalam resepsi atau acara lain. Kegiatan ini adalah sumber penghasilan utamanya. Jumlah acara perminggu sekitar 5-6 acara. Dampak dari kebijakan PSBB adalah tidak adanya kegiatan yang mengumpulkan orang banyak yang membutuhkan catering. Hal ini akan memiliki konsekuensi yang sangat negatif bagi usahanya.

Langkah 2: *Ibu Sari menetapkan tujuan dari Perencanaan Keberlangsungan Usaha nya*

Tujuannya adalah untuk mengembangkan proses internal yang sederhana untuk usahanya yang akan memberikan perlindungan kunci untuk: orang, proses, keuntungan dan kemitraan. Hal ini berarti:

- Memaksimalkan keselamatan fisik dan emosional dirinya dan para pekerjanya;
- Usaha kembali beroperasi secepat mungkin setelah terjadi gangguan;
- Pastikan bahwa makanan yang disediakan tahan terhadap gangguan yang terkait dengan COVID-19;
- Menjaga rantai pasokannya; dan
- Memastikan bahwa usahanya memenuhi komitmen kontrak dengan pelanggan.

Langkah 3: *Ibu Sari mengevaluasi potensi dampak gangguan terhadap perusahaan dan pekerja*

Dia menilai dampak gangguan terhadap usaha kuncinya. Usaha apa yang diperlukan untuk agar tetap dapat memberi penghasilan dan kekurangan apa yang bisa ditoleransi: Dia mengidentifikasi proses apa yang diperlukan agar tetap dapat menyelenggarakan catering atau tetap membuat makanan meskipun tidak diperuntukkan untuk acara tertentu dan di mana letak risikonya? Ini membutuhkan upaya singkat pemetaan stakeholder. Ada lima stakeholder utama yang sangat penting bagi usahanya: Pekerja, pelanggan, pemasok, layanan dukungan, dan otoritas regulasi.

- Pekerja: Ibu Sari memiliki 25 (dua puluh lima) orang pekerja berasal dari masyarakat setempat (untungnya tempat tinggal mereka dekat dan berjalan kaki ke tempat kerja).
- Pelanggan: 70 (tujuh puluh) persen pengguna jasa usaha Ibu Sari adalah *vendor wedding organizer* yang pada saat ini sedang tidak ada kegiatan acara. Sedangkan 30 (tiga puluh) persen sisanya adalah masyarakat sekitar yang menggunakan jasa catering ibu Sari untuk acara sederhana di rumah.
- Pemasok: Dia bergantung pada tiga pemasok. Pertama pemasok Bahan makanan pokok; kedua pemasok daging dan sayuran dan ketiga pemasok plastik dan kemasan. Ibu Sari berkomunikasi secara rutin dengan semua pemasok.

- Layanan Dukungan: dalam mengantarkan makanan, ibu sari menyewa kendaraan kepada usaha rental mobil yang ada di dekat usahanya, terkadang ibu sari juga mengirimkan makanan melalui ojek *online*.
- Utilitas publik dan otoritas regulasi: ini termasuk badan standar pangan yang mengeluarkan lisensi; otoritas perpajakan dan departemen pemerintah daerah yang mengawasi standar K3.

Hal ini menunjukkan bagaimana Ibu Sari mengharapakan faktor eksternal tetap sehat dan dalam hal pemasok, layanan dukungan dan pelanggan, dapat tetap menjalankan usaha. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia berpotensi bangkrut dalam waktu dua sampai empat minggu apabila pandemi Covid -19 terus berlangsung. Dia menilai "apa yang akan menjadi dampak bila tidak melakukan operasi kuncinya?" Dia mengamati setiap *stakeholder* di atas dan menyadari bahwa gangguan terhadap para *stakeholder* akan menyebabkan gangguan pada usahanya.

Dia menilai gangguan potensial utamanya sebagai berikut:

- Pekerja jatuh sakit (pekerjanya/pekerja pemasok/pekerja layanan dukungan);
- Pembatasan pemerintah dengan tidak membolehkan acara yang mengumpulkan orang banyak menyebabkan penurunan pesanan catering.
- Pembatasan pemerintah pada kebebasan bergerak dapat mempengaruhi kemampuannya (dan pemasoknya) untuk bekerja;

Dia berpikir tentang apa yang berada di luar kendali nya dan bagaimana dampak terhadap pemasok dan apa yang berada dalam kendali-nya yang dapat ia kendalikan sampai batas tertentu. Pada sisi negatif, dia sangat tergantung pada orang lain, terutama para *vendor* pengguna jasa kateringnya, pemasoknya dan dia tidak bisa mengubah larangan pemerintah.

Langkah 4: *Ibu Sari mengambil tindakan untuk melindungi usahanya*

Ibu sari harus mengubah cara pemasaran jasa kateringnya dari pemasaran untuk acara-acara besar menjadi jasa catering untuk rumahan.

1. Orang

- Dia memutuskan untuk membatasi kontak dalam usahanya dan mendirikan titik sanitasi sehingga dia dan pekerjanya kurang terekspos.
- Selain tindakan keamanan/sanitasi, ia meninjau cara standar untuk bekerja dan mengadaptasi kriteria jarak sosial. Ini memerlukan pengaturan cara kerja shift baru yang dia diskusikan dengan pekerjanya.

- Dia bersiap terhadap peningkatan ijin tidak kerja.

2. Proses

- Saat memimpin inisiatif secara keseluruhan, dia meminta para pekerja untuk menjadi sukarelawan untuk tugas berikut: memastikan poin sanitasi diisi dengan baik setiap hari; menetapkan tempat pemeriksaan suhu di pintu masuk untuk semua pekerja/pemasok/pelanggan/pengunjung; konsultasi harian dengan pemasok dan pelanggan untuk mengetahui situasi mereka yang mereka alami dan setiap perubahan yang telah terjadi; dan memastikan semua orang paham cara untuk tetap aman di rumah.
- Dia membahas bersama semua pelanggan dan pemasok bagaimana sistem keselamatan mereka dan bagaimana mereka mematuhi peraturan baru. Ibu Sari berusaha untuk membeli bahan makanan secara online
- Dia masih membayar beberapa pemasok secara tunai. Dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengubah semua pembayaran (masuk dan keluar) ke dalam format digital.
- Dia memback-up semua datanya secara teratur atau otomatis dan menyimpannya data cadangannya di rumah dalam kemungkinan Dia harus melakukan isolasi diri.

3. Keuntungan

- Dia memperhatikan ada peningkatan permintaan untuk makanan beku dan makanan ringan. Ada kesempatan untuk meningkatkan penjualan.
- Dia menghitung biaya operasional sehari-hari (gaji, sewa, persediaan, dll) dan membuat simulasi berdasarkan kebutuhan keuangan jika gangguan terjadi.
- Dia melakukan percakapan rutin dengan bank yang telah memberinya kredit. Bank itu mengetahui "Perencanaan Keberlangsungan usaha"-nya dan ada kebijakan pemerintah untuk memberikan fleksibilitas persyaratan pinjaman, jika diperlukan.

4. Kemitraan

- Dia membuat kesepakatan dengan empat pemilik UKM lainnya untuk saling berbagi tindakan dan praktik keselamatan usaha mereka masing-masing. Mereka menyetujui prosedur umum untuk menjaga agar pekerja tetap aman. Mereka juga setuju untuk berbagi informasi tentang cara menangani masalah tempat kerja seperti perubahan waktu kerja, kemungkinan redundansi; dan masalah SDM lainnya.

- Dia berdiskusi dengan otoritas perpajakan kemungkinan penangguhan pajak yang dia dengar dari media.

Langkah 5: *Ibu Sari membuat daftar kontak*

- Dia membuat daftar kontak utama dari pihak berwenang dan pihak ketiga (polisi, Layanan darurat, petugas pemadam kebakaran, rumah sakit terdekat, perusahaan asuransi) yang dapat memberikan bantuan selama keadaan darurat.
- Dia membuat daftar pekerja, posisi mereka dan rincian kontak (ponsel dan alamat email) dan juga rincian kontak darurat pekerja.
- Dia membuat daftar pelanggan baru dan pelanggan lama, pemasok, kontraktor dan instansi pemerintah yang bekerja dengannya, termasuk kontak person dan rincian kontak (ponsel, alamat email dan alamat jalan), Semua yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi.
- Dia memilih metode komunikasi untuk berhubungan dengan para pekerjanya selama krisis COVID-19 (Facebook, WhatsApp, Google Form) dan mendirikan emergency call tree.
- Pekerja yang memiliki kendaraan bermotor diberi insentif tambahan melalui pekerjaan tambahan untuk membantu mengirimkan makanan yang dipesan di area sekitar tempat usaha ibu Sari.
- Dia bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi atau pengiriman dan ojek *online* untuk membantu mengirim makanan yang dipesan.

Langkah 6: *Ibu Sari memelihara, meninjau dan terus memperbarui Perencanaan Keberlangsungan Usahanya*

Dia meninjau dan memperbarui rencananya setiap minggu untuk:

- Perbarui tujuan Perencanaan Keberlangsungan Usaha-nya dan untuk meningkatkan efektivitas;
- Update penilaian risiko, strategi untuk kelangsungan usaha dan prosedur lain yang terkandung dalam Perencanaan Keberlangsungan Usaha; dan
- Memastikan perbaikan terus-menerus dari semua proses yang termasuk dalam Perencanaan Keberlangsungan Usahanya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 bagi UKM dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB IV

PENUTUP

Panduan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) ini disusun untuk membantu mempersiapkan perencanaan UKM dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pelaku UKM diharapkan dapat menyusun dan mempunyai perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis UKM masing-masing.

Untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif, maka pelaku UKM diharapkan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha yang disesuaikan dengan keadaan atau situasi pandemi yang sedang terjadi.

**Plt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**



Drs. M. Iswandi Hari, SH., M.Si
NRP 63020780